

Konsep Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan (Studi Kasus : Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi)

The Management Concept of Sustainability Coastal Area
(Case Study: Muaragembong Residence, Bekasi District)

¹Risyda Atqiyani Setra, ²Yulia Asyiwati

^{1,2}*Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹risydaatqiyanisetra@gmail.com, ²yulia_asyiwati@yahoo.com

Abstract. Muaragembong Coastal Zone has a variety of resources and potential problems. Problems experienced by the study area is the conflict utilization of space, such irregularity space utilization, environmental degradation, declining public revenues, abrasion and land conversion. Utilization of space utilized by people still do not follow the rules of the applicable rules. To mitigate and minimize the impact of the problems and improve the functionality and quality of the potential that exists in coastal areas Muaragembong, it is necessary to manage the spatial use of coastal areas in a sustainable manner. Data collection method used is the method of data collection field observation, unstructured interviews and questionnaires, as well as secondary data. The analytical method used diantaranya capacity analysis space utilization, analysis of human resources (HR), which consists of the analysis of population projections and analysis of the quality of human resources, analysis of the quality of the coastal economy and environment, analysis of people's economic condition consisting of an economic analysis of coastal and analyzes disparities economic region, analysis of social conditions relation to the utilization of space and SWOT analysis. The findings in this study in terms of environmental aspects / physical carrying capacity is dominated by the carrying capacity, there is damage and peurunan environmental quality caused by erosion, sedimentation resulting burutk on water quality. From the social aspect of the population 20 years the number had grown and have quality Human Resources (HR) is low in the field of education, from the aspect of people's income, that people have low income levels below the minimum wage, low education levels or bad impact on not terkelolanya coastal areas. While aspects of the economy of regional economic disparity, the economic benefits of the existence of mangrove ecosystems, existence of various economic benefits from ecosystem existence mangrove. The potential and problems found in coastal areas need Maragembong holding space utilization management in order to create sustainability in terms of physical environment, social, and economic.

Keywords: Space Utilization Management, Coastal Region, Sustainable

Abstrak. Wilayah Pesisir Muaragembong memiliki berbagai potensi dari sumberdayanya dan berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami wilayah studi yaitu konflik pemanfaatan ruang, diantaranya ketidakteraturan pemanfaatan ruang, penurunan kualitas lingkungan, penurunan pendapatan masyarakat, abrasi dan alih fungsi lahan. Pemanfaatan ruang yang dimanfaatkan masyarakat masih belum mengikuti kaidah kaidah yang berlaku. Untuk menanggulangi dan meminimalisir dampak dari permasalahan serta meningkatkan fungsi dan kualitas dari potensi yang ada di wilayah pesisir Muaragembong, maka diperlukan pengelolaan pemanfaatan ruang wilayah pesisir secara berkelanjutan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data observasi lapangan, wawancara tidak terstruktur dan kuesioner, serta data sekunder. Metode analisis yang digunakan diantaranya analisis daya dukung pemanfaatan ruang, analisis sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari analisis proyeksi penduduk dan analisis kualitas sumberdaya manusia, analisis kualitas ekonomi pesisir dan lingkungan, analisis kondisi perekonomian masyarakat yang terdiri dari analisis ekonomi pesisir dan analisis disparitas ekonomi wilayah, analisis hubungan kondisi sosial masyarakat terhadap pemanfaatan ruang dan analisis SWOT. Hasil temuan pada penelitian ini dari segi aspek lingkungan/fisik memiliki daya dukung yang didominasi oleh daya dukung, terjadi kerusakan dan peurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh abrasi, terjadinya sedimentasi yang berakibat burutk pada kualitas air. Dari aspek sosial jumlah penduduk 20 tahun mendatang jumlahnya bertambah dan memiliki kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang rendah pada bidang pendidikan, dari aspek pendapatan masyarakat, bahwa masyarakatnya mempunyai tingkat pendapatan yang rendah di bawah UMR, tingkat pendidikan yang rendah atau buruk berdampak pada tidak terkelolanya wilayah pesisir. Sedangkan dari aspek ekonomi mengalami disparitas ekonomi wilayah,

adanya berbagai manfaat ekonomi dari keberadaan ekosistem mangrove, Adanya berbagai manfaat ekonomi dari keberadaan ekosistem mangrove. Untuk itu potensi dan permasalahan yang terdapat di wilayah pesisir Maragembong perlu diadakannya pengelolaan pemanfaatan ruang agar terciptanya keberlanjutan dari segi fisik lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Kata Kunci Pengelolaan Pemanfaatan Ruang, Wilayah Pesisir, Berkelanjutan

A. Latar Belakang

Wilayah Pesisir Muaragembong terdiri dari 5 (lima) desa diantaranya yaitu Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Bakti, Desa Pantai Sederhana, Desa Mekar, dan Desa Pantai Harapan Jaya. Pada wilayah pesisir Muaragembong terdapat fenomena yang terjadi yaitu pemanfaatan lahan yang belum terkelola akibat dari kegiatan manusia yang mengeksploitasi sumberdaya pesisir dan berbagai pemanfaatan wilayah pesisir seperti wilayah lindung, wilayah budidaya, kegiatan pariwisata, jalur transportasi, kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan tersebut menimbulkan permasalahan atau konflik utama yang terjadi di wilayah pesisir Muaragembong yaitu tidak teraturnya pemanfaatan ruang, penurunan kualitas lingkungan, dan penurunan pendapatan masyarakat, abrasi dan alih fungsi lahan.

Dari aspek sosial permasalahan yang terjadi yaitu sumberdaya manusia (tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah), sanitasi masyarakat, dari aspek segi fisik dan lingkungan yaitu adanya bencana alam yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat wilayah pesisir ini. Bencana alam yang paling sering terjadi yaitu abrasi, banjir rob, dan banjir luapan Daerah Aliran Sungai (DAS). Tidak hanya permasalahan tersebut yang dapat memberi pengaruh untuk kemajuan wilayah pesisir ini, tetapi sistem kelembagaan, turut andilnya pemerintah, sosial budayanya juga termasuk kedalam faktor yang mempengaruhi kemajuan Wilayah Pesisir Muaragembong ini. Permasalahan tersebut berdampak pada segi sosial, ekonomi, dan lingkungan atau fisik diantaranya produksi ikan menurun, terganggunya kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove menurun, ekosistem estuaria dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman dan tambak ikan, terjadinya abrasi akibat mangrove dan dermaga dijadikan permukiman, kebiasaan masyarakat mandi, mencuci dan buang air langsung dibuang ke sungai. Pembuangan sampah yang tidak terkelola seperti tidak adanya TPS sehingga membuat lingkungan menjadi tidak bersih dan kumuh, konflik penataan atau pemanfaatan ruang dan berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat.

Sedangkan untuk potensi yang dimilikinya yaitu ekosistem mangrove, ekosistem estuaria, adanya budidaya perairan seperti budidaya rumput laut dan budidaya ikan, budidaya udang windu, budidaya kepiting, kearifan budaya lokal, dan sumberdaya buatan serta sumberdaya manusianya.

Pemanfaatan ruang di Wilayah Pesisir Muaragembong masih belum dikatakan berkelanjutan karena tidak teraturnya pemanfaatan ruang yang terjadi. Untuk menanggulangi dan meminimalisir dampak dari permasalahan serta meningkatkan fungsi dan kualitas dari potensi yang ada di Wilayah Pesisir Muaragembong, maka diperlukan pengelolaan pemanfaatan ruang wilayah pesisir secara berkelanjutan.

B. Landasan Teori

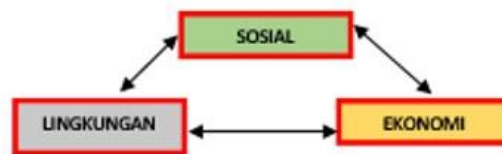
1. Pengertian Wilayah Pesisir

Menurut UU No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Wilayah pesisir merupakan

wilayah pertemuan antara darat dan laut; dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, perembasan air laut yang dicirikan oleh jenis vegetasi yang khas dan batas ke arah laut mencakup bagian atau batasan terluar dari paparan benua, dimana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi oleh aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (La Sara : 11, 2013)

2. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar utama yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berkaitan dan memperkuat. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan sebab-akibat. Hubungan ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (*bearable*). Ketiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan. Ketiga pilar atau aspek berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Aspek Berkelanjutan

Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (*capital maintance*), dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti, bahwa kegiatan dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumberdaya alam termasuk keanekaragaman hayati (*biodiversity*), sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan suatu strategis pembangunan yang memberikan semacam ambang batas pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Ambang batas ini tidaklah bersifat mutlak, melainkan merupakan batas yang luwes yang bergantung pada kondisi teknologi dan sosial ekonomi tentang pemanfaatan sumber daya alam, serta kemampuan biosfer untuk menerima dampak kegiatan manusia. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan adalah suatu strategi pemanfaatan ekosistem alamiah sedemikian rupa, sehingga kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia tidak rusak. Secara garis besar konsep pembangunan berkelanjutan memiliki empat dimensi: (1) ekologis, (2) sosial ekonomi budaya, (3) sosial politik, dan (4) hukum dan kelembagaan. (Dahuri, et.all :153-154, 2013)

Pengelolaan pesisir berkelanjutan memiliki makna pemeliharaan

keseimbangan antara kewajiban dan tanggung jawab terhadap fungsi lingkungan hidup sesuai dengan tujuan pengelolaan perairan pesisir untuk perwujudan kesejahteraan dan mutu hidup manusia. Pemeliharaan keseimbangan lingkungan membutuhkan perencanaan pemanfaatan yang efektif terhadap sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir.

Dalam pencapaian target pembangunan lingkungan perairan pesisir berkelanjutan diperlukan indikator kinerja yang tak terlepas dari indikator pembangunan berkelanjutan mencakup faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan serta kelembagaan. Faktor tersebut merupakan dasar pertimbangan dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir (Wiyana, 2004).

Indikator sosial ekonomi diidentifikasi dengan pencapaian tingkat pendapatan masyarakat nelayan tradisional yang dapat memenuhi kebutuhan nelayan tradisional dalam tingkat keluarga sejahtera seperti kepemilikan rumah layak sesuai kriteria keluarga sejahtera (BKKBN, 2002), memiliki pendidikan yang cukup, sehingga dapat memberikan bekal terhadap nelayan untuk peningkatan keterampilan. Memiliki sarana dan prasarana, sehingga para nelayan tradisional akan menjadi tangguh. Memiliki kapasitas pemikiran untuk dapat memotivasi diri melindungi lingkungan perairan pesisir. Indikator lingkungan hidup dilihat dari kualitas lingkungan pesisir dengan parameter yang tidak melewati nilai ambang batas baku mutu yang ditetapkan. Toleransi organisme perairan merupakan indikator yang dapat digunakan dalam kaitannya dengan kebutuhan biota yang hidup perairan pesisir. Indikator kelembagaan dinilai dari kemampuan kelembagaan dalam menerapkan tugas pokok dan fungsinya dan mampu mengatasi konflik. Kemampuan kelembagaan dalam perlindungan dan pengelolaan dalam menghidupkan kegiatan ekonomi produktif berbasis sumberdaya lokal dan mengendalikan sumber pencemar yang berkontribusi badan perairan.

C. Hasil Penelitiandan Pembahasan

1. Analisis Daya Dukung Pemanfaatan Ruang

Analisis daya dukung pemanfaatan ruang yang dilakukan, analisis ini menggunakan metode *overlay* antara peta kesesuaian lahan dan peta rawan bencana alam. Daya dukung lahan pada wilayah pesisir Muaragembong merupakan jumlah luasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. 1. Wilayah Lindung
- b. 2. Wilayah Rawan Bencana Alam
- c. 3. Wilayah Konservasi Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai

$$\text{DAYA DUKUNG} = \text{LUAS WILAYAH} - (\text{WILAYAH LINDUNG} + \text{RAWAN BENCANA ALAM} + \text{SEMPADAN SUNGAI})$$

Tabel 1. Daya Dukung Wilayah Pesisir Muaragembong

No	Desa	Daya Dukung Lahan (Ha)					
		Tinggi	%	Sedang	%	Rendah	%
1	Pantai Mekar	828	14,55	639	23,57	804	20,44
2	Pantai Sederhana	378	6,64	341	12,58	406	10,32

No	Desa	Daya Dukung Lahan (Ha)					
		Tinggi	%	Sedang	%	Rendah	%
3	Pantai Bakti	1903	33,44	415	15,31	750	19,06
4	Pantai Bahagia	1167	20,51	587	21,65	465	11,82
5	Pantai Harapanjaya	1415	24,86	729	26,89	1509,07	38,36
Luas Total		5691	100	2711	100	3934	100

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2015

Luasan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya merupakan wilayah dengan Intensitas Rawan Genangan Rendah dimana :

Rawan Genangan Rendah >< Daya Dukung Tinggi

Dari hasil analisis didapat daya dukung tinggi berada di Desa Pantai Harapanjaya dengan luas 1415 Ha, dan yang terendah adalah Desa Pantai Sederhana dengan luas 406 Ha.

2. Analisis Sumberdaya Manusia (SDM)
 - a. Analisis Proyeksi Penduduk

Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam menghitung proyeksi penduduk yaitu menggunakan metode *regresi linier* karena jumlah penduduknya setiap tahun mengalami fluktuasi. Berikut ini hasil analisis proyeksi penduduk di Wilayah Pesisir Muaragembong dapat dilihat pada **Tabel 2** di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Proyeksi Jumlah Penduduk Wilayah Pesisir Muaragembong Tahun 2014-2034

No	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2014	2019	2024	2029	2034
1	Pantai Mekar	8.277	9.778	11.278	12.779	14.279
2	Pantai Sederhana	3.804	4.098	4.393	4.687	4.982
3	Pantai Bakti	7.111	7.796	8.481	9.166	9.851
4	Pantai Bahagia	6.735	6.293	5.851	5.409	4.967
5	Pantai Harapanjaya	6.885	7.379	7.873	8.367	8.861
Jumlah		32.812	35.344	37.876	40.408	42.841

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Dari hasil analisis, proyeksi kependudukan di Wilayah Pesisir Muaragembong dari tahun 2014 – 2034 terus mengalami kenaikan.

- b. Analisis Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM)

Dari data yang didapatkan, bahwa untuk menganalisis kualitas sumberdaya manusia dengan melihat aspek sosial dan ekonomi masyarakatnya. Dari aspek sosial tingkat pendidikan penduduk wilayah pesisir Muaragembong didominasi oleh penduduk yang menempati jenjang pendidikan tidak tamat SD yaitu sebanyak 4615 jiwa, sedangkan untuk jenjang pendidikan yang paling rendah atau lulusan Perguruan Tinggi (PT) hanya berjumlah 146 jiwa.

Dari aspek ekonomi pendapatan masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner penduduk disana didominasi dengan pendapatan yang rendah yaitu < Rp.1.500.000/ bulannya. Tentu ini masih dikatakan jauh dibanding dengan angka Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Bekasi yaitu sebesar Rp 2.447.445 per bulannya. Dari

kedua kondisi sosial dan ekonomi tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah pesisir Muaragembong masih dikatakan rendah. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia wilayah pesisir Muaragembong agar terciptanya wilayah pesisir yang berkelanjutan.

3. Analisis Kualitas Ekosistem Pesisir dan Lingkungan

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang rentan terkena banjir dan abrasi. Berdasarkan hasil pengamatan di wilayah studi, terjadi kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh abrasi. Untuk lebih jelasnya pergeseran luas wilayah daratan di wilayah pesisir Muaragembong yang didapat dari data sekunder dapat dilihat pada **Tabel 3** di bawah ini.

Tabel 3. Pergeseran Luas Daratan Wilayah Pesisir Muaragembong

No	Desa	Luas (Ha)			Pergeseran	
		KCDA	2012*	2015*	Luas (ha)	%
1	Pantai Harapan Jaya	4.680,00	3.763,00	3.680,55	(-999,45)	-21,36
2	Pantai Mekar	1.225,00	2.240,00	2.238,53	1.013,53	82,74
3	Pantai Sederhana	1.033,00	1.352,00	1.261,47	228,47	22,12
4	Pantai Bakti	3.331,00	2.815,00	2.814,26	(516,74)	-15,51
5	Pantai Bahagia	3.454,00	3.135,00	2.750,35	(-703,65)	-20,37
Jumlah		13.723,00	13.305,00	12.745,16	-977,84	47,62

Sumber : - Hasil Analisis, tahun 2015

- Hasil ground check dan interpretasi peta, tahun 2015

Berdasarkan data yang ada, pergeseran daratan di wilayah pesisir Muaragembong terjadi akibat pengaruh dari arus, pasang surut dan gelombang laut. Hal ini disebabkan karena berkurangnya luasan ekosistem mangrove yang ada di wilayah pesisir Muaragembong, sehingga berkurangnya manfaat atau fungsi dari mangrove itu sendiri sebagai penyangga dan pelindung pantai dan fungsinya sebagai pengedali banjir. Hal ini mengakibatkan kawasan perairan bertambah dan kawasan daratan berkurang.

Luapan air atau b

yang terjadi karena luapan air sungai Citarum yang mengalir di wilayah pesisir Muaragembong. Hal ini terjadi karena Muaragembong merupakan muara Sungai Citarum. Akibat dari berkurangnya kualitas dan kuantitas mangrove di pesisir Muaragembong fungsi ekologis dari ekosistem mangrove sebagai peredam sedimen menjadi berkurang. Sedimen yang meningkat mengakibatkan kondisi kualitas air yang buruk menunjukkan bahwa nilai parameter fisik Padatan Tersuspensi Total (TSS) dan Padatan Terlarut Total (TDS) di ketiga titik pengambilan sample air yakni di Muara Beting, Muara Bungin dan Muara Jaya tidak memenuhi baku mutu. Hal ini dapat mengakibatkan pendangkalan pada muara, yang mengakibatkan kapasitas daya tampung air pada muara ini berkurang, sehingga banjir akan terjadi apabila intensitas air yang berasal dari gelombang pasang dan air hujan.

Kandungan BOD, COD, Fenol, Besi, Florida, Sulfida, tembaga dan timbal tinggi yaitu diatas ambang batas normal yang dianjurkan. Berdasarkan pada kondisi ini, kualitas perairan sudah menunjukkan kurang baik untuk pertumbuhan ikan, dan kondisi perairan ini sangat membahayakan pada kondisi kesehatan masyarakat. Selain itu, kandungan coliform dan bakteri *E-Coli* yang diambang batas baku mutu. Kondisi ini akan memberi dampak buruk bagi

kesehatan masyarakat yang menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan mencuci dan mandi.

4. Analisis Perekonomian Masyarakat

a. Analisis Ekonomi Pesisir

Ekosistem mangrove mempunyai fungsi secara ekonomi, yaitu dapat dimanfaatkan untuk penghasil bahan obat-obatan, sebagai penghasil bahan pangan seperti ikan, udang, kerang kepiting, serta sebagai tempat rekreasi dan wisata (Bengen, 2004 dalam Asyiwati 2014). Tidak hanya itu, ekosistem mangrove dimanfaatkan sebagai ekowisata dan bahan dasar pengolahan pembuatan camilan dodol, sirup dan camilah kering. Dodol, sirup dan camilan kering ini dibuat dengan memanfaatkan buah mangrove atau yang disebut dengan vidada yang memiliki rasa asam dan sedikit kecut. Batang pohon mangrovepun dapat dijadikan sebagai bahan pembuat bahan perlengkapan olahraga yaitu kok badminton.

Manfaat lain dari ekosistem mangrove ini yaitu sebagai penangkapan ikan, udang, dan kepiting dan kayu bakar hanya dimanfaatkan pada saat ada acara hajatan pernikahan atau sunatan yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak.(Hilwati et.all, 2015).

Dari beberapa manfaat dari keberadaan ekosistem mangrove, manfaat tersebut bisa menjadi peluang bagi masyarakat setempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha (*home industry*) agar dapat menambah pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, manfaatnya bisa juga dirasakan oleh pemerintah setempat yaitu dapat mengurangi pengeluaran yang dipergunakan untuk pemberian bantuan jika terjadi bencana.

b. Analisis Disparitas Ekonomi Wilayah

Pada analisis ini, berdasarkan data sekunder yang didapat dari Masterplan Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Bekasi bahwa Muaragembong memiliki nilai Indeks Williamson dari tahun 2009-2013 selalu memiliki nilai di atas 0 (nol). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 4** di bawah ini.

Tabel 4.Nilai Indeks Williamsom Tahun 2009-2013

Tahun	Nilai Indeks Williamson
2009	0,100
2010	0,076
2011	0,077
2012	0,080
2013	0,088

Sumber :*Masterplan Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Bekasi, 2015*

Secara ekstrim, jika angka indeks sama 0 (nol) maka menandakan tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Setiap tahunnya Muaragembong memiliki nilai Indeks Williamson lebih dari 0 (nol) itu artinya bahwa Muaragembong ini terjadi disparitas ekonomi wilayah, maka dapat dikatakan pesisir Muaragembong belum mencapai kesejahteraan.

5. Analisis Hubungan Kondisi Sosial Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Ruang

Analisis ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan pola pemanfaatan ruang di wilayah pesisir

Muaragembong. Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan terhadap masyarakat di wilayah pesisir Muaragembong diperoleh hasil bahwa terdapat 5 variabel yang mempengaruhi terhadap pola pemanfaatan ruang, yaitu :

- F1: Tingkat Pendidikan Masyarakat
- F2: Keadaan Ekonomi Masyarakat
- F3: Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Muaragembong
- F4: Kondisi Sanitasi Masyarakat Setempat
- F5: Pemahaman Masyarakat Mengenai Pemanfaatan Ruang

Dari ke lima faktor tersebut, yang sangat mempengaruhi terhadap pola pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Muaragembong adalah tingkat pendidikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola pemanfaatan ruang di wilayah Muaragembong akan selalu tidak terkelola dengan baik apabila kondisi tingkat pendidikan/pengetahuan masyarakat serta tingkat perekonomian/pendapatan masyarakat tidak meningkat.

6. Analisis SWOT

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah pengelolaan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Muaragembong yang dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal.

Potensi:

- a. 1. sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya;
- b. 2. Sumberdaya pesisir yang ada berupa ekosistem mangrove dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekowisata yang dapat memberikan *multipliereffect* terhadap pendapatan masyarakat.

Masalah

- a. 1. Kualitas sumberdaya manusia di wilayah pesisir Muaragembong rendah,
- b. 2. Tingkat pendapatan masyarakat rendah
- c. 3. Sistem kelembagaan yang ada di wilayah pesisir Muaragembong yang berupa LSM untuk merehabilitasi ekosistem mangrove, kurang didukung oleh masyarakat

Peluang dan Tantangan Wilayah Pesisir

- a. Hasil produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya khususnya untuk komoditi ikan bandeng dan udang merupakan komoditi yang dibutuhkan oleh wilayah sekitar.
- b. Kuatnya arus dan pasang surut menimbulkan dampak terhadap lingkungan diantaranya adalah banjir rob dan abrasi
- c. Tingginya intensitas pembangunan yang dilakukan di wilayah tengah dan hulu Sungai Citarum

D. Kesimpulan

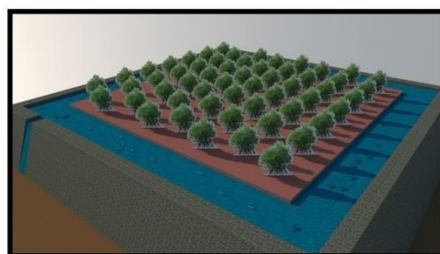
Berdasarkan pada kondisi di atas, dapat disimpulkan, bahwa untuk dapat mewujudkan pengelolaan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan di wilayah pesisir Muaragembong di masa yang akan datang, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Sosial

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan tingkat pendidikan. Konsep pendidikan untuk wilayah pesisir mengadakan sekolah khusus atau adanya ekstrakurikuler mengenai pendidikan mengelola wilayah pesisir. Stakeholder yang berperan disini

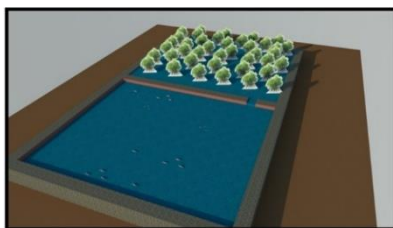
yaitu Dinas Pendidikan kabupaten Bekasi

- b. Mensosialisasikan manfaat dari segi ekonomi maupun lingkungan dan sosial dari keberadaan ekosistem pesisir mangrove dan estuaria dengan mengadakan penyuluhan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Bekasi.
2. Aspek Ekonomi
 - a. Menanam pohon mangrove di setiap lahan yang dimanfaatkan untuk pertambakan, dengan adanya mangrove manfaat dari segi ekonomi salah satunya dapat meningkatkan kualitas sumberdaya ikan karena unsur zat hara yang dihasilkan oleh mangrove dapat menjadi makanan bagi ikan sehingga dapat dijual dengan harga yang relatif lebih tinggi.
 - b. Membuat *home* industri hasil sumber daya alam khususnya hasil olahan dari buah mangrove dengan membuat produk sirup, dodol, makanan kering, sebagai oleh-oleh khas Muaragembong bagi wisatawan yang berkunjung ke ekowisata mangrove
 3. Aspek Lingkungan
 - a. Menanam ekosistem mangrove di area rawan bencana abrasi yang telah dijadikan lahan pertambakan dengan memberi bagian untuk ekosistem mangrove dan sebagian kecil untuk lahan tambak pada sekitar garis pantai dan untuk mangrove. Konsep ini diterapkan di garis pantai di Desa Pantai Bakti, Desa Harapan Jaya dan Desa Pantai Bahagia.
 - b. Menanam ekosistem mangrove di daerah yang terjadi sedimentasi tinggi untuk mengurangi akibat daripada sedimen yang berdampak pada kualitas air dan menanggulangi terjadinya banjir akibat pendangkalan daerah penangkapan air akibat hujan atau air dari muara sungai. Pada kawasan ini dapat ditanami jenis mangrove *Rhizophora sp* (tongke)
 - c. Merelokasi permukiman yang berada di daerah rawan abrasi ke daerah yang tidak rawan abrasi atau memiliki tingkat daya dukung yang rendah ke daerah yang tidak rawan terjadinya bencana abrasi atau yang memiliki daya dukung tinggi agar tetap mempertahankan fungsinya kawasan lindung.
 - d. Menerapkan konsep *silvofishery* pada lahan pertambakan dan sebagian kecil pada daerah abrasi dengan menerapkan pola empang parit dan komplangan.
 - e. Merelokasi bangunan yang berada di kawasan estuaria ke kawasan yang cocok untuk bangunan atau di daerah yang memiliki daya dukung tinggi agar kawasan estuaria tersebut seutuhnya menjadi kawasan lindung



Gambar 2. Model Penanaman Ekosistem Mangrove Tumpang Tindih pada Lahan Pertambakan

Sumber : Hasil Ilustrasi, 2016



Gambar 3. Model Penanaman Ekosistem Mangrove Komplangan pada Lahan Pertambakan

Daftar Pustaka

- La Sara, Prof.Ir.,M.Si.,Ph.D. Mei 2014. Pengelolaan Wilayah Pesisir gagasan Memelihara Aset Wilayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa. Alfabeta: Bandung
- Prof.Dr.Ir..M.S.H Rokhim Dahuri,dkk. Cetakan Kelima 2013.Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Balai Pustaka : Jakarta Timur
- Apridiar,dkk. 2011. Ekonomi Kelautan dan Pesisir. Graha Ilmu : Yogjakarta
- Adisamita, Rahardjo. 2010. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang.Garaha Ilmu:Yogjakarta
- Adisamita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan.Garaha Ilmu:Yogjakarta
- Hilwati,et.all. Peranan Ekosistem Mangrove dalam Mendukung Sistem Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, 2015
- Prof.Dr.dr.H Imam Supardi,dkk. 2003. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya.PT Alumni : Bandung
- Rachmad K.Dwi Susilo.2012. Sosiologi Lingkungan.Rajawali Pers : Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil . Lembaran Negara RI Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2033 Kabupaten Bekasi
- Laporan Akhir Intepretasi Foto Udara Kabupaten Bekasi
- BAPPEDA Kab.Bekasi, Masterplan Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Bekasi, 2015
- Agita. 17 Mei 2014 <http://www.menujujauh.com/2014/05/mengenal-sisi-lain-bekasi-lewat-muara.html> Diunduh pada tanggal 21 januari 2015 pukul 11.34
- Anonim. 23 Maret 2013. <http://p3mpbekasi.blogspot.com/2013/03/kontak.html> . Diunduh pada tanggal 18 Februari 2015 Pukul 10.05
- Anonim. 26 januari 2013. http://birawaclub.blogspot.com/2013/01/muaragembong_25.html. Diunduh pada tanggal 19 Februari 2015 Pukul 08.00
- Pauziah. 31 Desember 2013.Silvofishery Sebagai Pilihan strategi Rehabilitasi Mangrove – Oleh Adnan Ardhana.. <http://foreibanjarbaru.or.id/archives/1144> diunduh pada tanggal Mei 2015